



KEGAGALAN SOSIALISME AFRICA (*AFRICAN SOCIALISM*) TANZANIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSPLOITASI SUMBER DAYA ALAM TAMBANG OLEH INGGRIS (2015-2020)

Ni Made Kayika Galuh¹, Siti R. Susanto^{2*}

¹ Program Studi Hubungan Internasional; Universitas Airlangga; Indonesia

*email: siti.susanto@fisip.unair.ac.id

Abstract

This paper examines the failure of Tanzania's African Socialism which leads the country's entrapment on exploitation of mining resources by the British government in 2015-2020. African Socialism is Tanzanian development ideology in conducting political and economic practices. However, during the era of President John Magufuli, cases of mining exploitation by the British companies have increased. Magufuli, who implemented African Socialism through a nationalist economic system failed to remove Tanzania from the category of least developed country. African Socialism should be emphasizing Tanzania's assertiveness in avoiding exploitation. This anomaly directs to a research question on why African Socialism failed to prevent Tanzania's mining resources from being exploited by the British in 2015-2020. The question is examined explanatively with state failure theory. This paper finds that the Magufuli government was intentionally incorrect in implementing African Socialism which exemplifies state-building failure. The failure eased British government and corporate concessions to Tanzania's mining resources.

Keywords: *African Socialism; exploitation; mining, state failure; Tanzania, United Kingdom*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji kegagalan Sosialisme Afrika (*African Socialism*) Tanzania yang menyebabkan terjebaknya negara dalam eksploitasi sumber daya tambang oleh Inggris pada tahun 2015-2020. Sosialisme Afrika adalah ideologi pembangunan Tanzania dalam praktik politik dan ekonomi. Namun, pada era presiden John Magufuli, kasus-kasus eksploitasi tambang oleh perusahaan Inggris telah meningkat. Magufuli yang mengimplementasikan Sosialisme Afrika melalui sistem ekonomi nasionalis gagal dalam mengeluarkan Tanzania dari kategori negara terbelakang. Sosialisme Afrika seharusnya menjadi ideologi pembangunan negara yang menekankan keteguhan Tanzania dalam menghindari eksploitasi. Anomali ini mengarahkan pada pertanyaan penelitian tentang mengapa Sosialisme Afrika gagal dalam mencegah eksploitasi sumber daya alam tambang Tanzania oleh Inggris pada tahun 2015-2020. Pertanyaan tersebut diteliti secara eksplanatif dengan teori kegagalan negara. Tulisan ini menemukan bahwa pemerintah Magufuli secara sengaja keliru dalam mengimplementasikan Sosialisme Afrika yang merupakan bentuk kegagalan pembangunan negara. Kegagalan tersebut mempermudah konsesi pemerintah dan perusahaan Inggris terhadap sumber daya tambang Tanzania.

Kata Kunci: eksploitasi; Inggris; kegagalan negara; Sosialisme Afrika; tambang; Tanzania

Pendahuluan

Tanzania merupakan wilayah bekas koloni Inggris sejak Perang Dunia I. Inggris menempatkan Tanzania sebagai sumber pemenuhan bahan tambang mentah dengan komoditas utama berupa emas, berlian, nikel, batu bara, dan uranium. Hingga Tanzania merdeka pada tahun 1961, sumber daya tambang menjadi kekuatan sekaligus tantangan bagi negara. Pemerintah Tanzania yang sadar akan risiko eksploitasi terhadap sumber daya tambangnya mendasari pembangunan negara dengan ideologi *African Socialism* atau Sosialisme Afrika. Sosialisme Afrika adalah ideologi sosialisme khas Afrika yang menggerakkan negara-negara Afrika untuk memperbaiki pembangunan ekonomi serta menghapus keberadaan kelas dan tribal pasca kemerdekaan. Sosialisme Afrika memiliki ciri khas utama berupa sistem ekonomi *self-reliance*, sistem politik sosialisme-demokratis, serta hubungan sosial komunal tanpa perbedaan kelas-kelas sosial.

Sosialisme Afrika dideklarasikan melalui Deklarasi Arusha tahun 1967 yang dibuat oleh presiden Julius Nyerere bersama partai utama Tanzania, yaitu *Tanganyika National African Union* (TANU). Pada bagian kedua dari deklarasi, yaitu “Kebijakan Sosialisme”, dituangkan prinsip-prinsip sosialisme berupa: (1) absensi eksploitasi, (2) kontrol produksi oleh pemerintah dan para pekerja, (3) eksistensi demokrasi, dan (4) sosialisme sebagai ideologi negara (TANU, 1967). Poin kedua dipertegas untuk memperlihatkan kontrol pemerintah terhadap sektor ekonomi melalui kalimat: “*The way to build and maintain socialism is to ensure that the major means of production are under the control and ownership of the Peasants and the Workers themselves through their Government and their Co-operatives*” (TANU, 1967). Sektor ekonomi yang menjadi kepemilikan negara secara penuh termasuk sumber daya mineral, tambang, dan minyak yang dikelola di bawah *State Mining Corporation* (STAMICO).

Deklarasi Arusha menjadi suatu momentum ditetapkannya Sosialisme Afrika sebagai ideologi Tanzania dalam memperjuangkan liberalisasi nasionalnya. Pembangunan sosialis secara spesifik ditujukan untuk menghindari pihak kapitalis yang bertentangan dengan karakter Afrika (Mohan, 1966: 221). “Sosialis” diartikan sebagai kontrol pemerintah terhadap ekonomi domestik untuk melawan pihak “kapitalis” yang diartikan sebagai sistem akumulasi kapital pihak tertentu yang mengsubordinasi kepentingan masyarakat Tanzania. Secara politik, Sosialisme Afrika menjadi ideologi dalam membentuk kebangsaan (*nationhood*) pascakolonial untuk menghindari

terbentuknya perbedaan kelas dan tribal dalam masyarakat (Mohan, 1966: 241). Secara ekonomi, Sosialisme Afrika menjelaskan intensi Tanzania dalam menerapkan kemandirian (*self-reliance*) pada produksi ekonomi agar tidak bergantung terhadap aktor asing.

Periode politik setelah Nyerere mengubah sistem politik Tanzania menuju sistem multi-partai sejak tahun 1992 (Bjerk, 2010: 304). TANU bergabung dengan partai Afro-Shirazi dan membentuk partai Chama Cha Mapinduzi (CCM) sebagai partai dominan. Pemerintahan Tanzania semakin memperjelas arah Sosialisme Afrika menuju sosialisme-demokratis dengan konstitusi: “*The United Republic is a democratic, secular and socialist state which adheres to multi-party democracy*” (Tanzania, 1992). Sedangkan, dalam sektor pertambangan, UU No. 14 tahun 2010 menyebutkan bahwa kontrol keseluruhan atas properti dan sumber daya mineral masih berada di tangan presiden Tanzania atas kepercayaan masyarakat. Pergeseran yang terjadi adalah Tanzania mengambil posisi sebagai regulator dan fasilitator sekaligus mempromosikan keterlibatan investasi swasta pada sektor tambang (Sipamba & Matiko, 2021).

Penelitian ini akan berfokus pada era presidensi John Magufuli pada tahun 2015-2020. Pada era ini, sumber daya mineral dan tambang merepresentasikan 52% dari total ekspor Tanzania (Kareparambil, 2017). Dengan demikian, terdapat kontradiksi dalam persentase kepemilikan pertambangan besar di Tanzania yang mayoritasnya dioperasikan oleh perusahaan Inggris. Salah satu contohnya adalah Acacia Mining yang menguasai tiga pertambangan emas besar. Eksploitasi menjadi semakin nyata ketika Acacia Mining tidak membayar pajak operasional, bunga, serta denda yang diperkirakan mencapai USD \$190 miliar atau melebihi tiga kali lipat dari *Gross Domestic Product* (GDP) Tanzania (Kazeem, 2017). Perusahaan-perusahaan tambang Inggris lainnya adalah Petra Diamonds yang menguasai berlian dan BG Group yang menguasai gas dan minyak (Curtis, 2016).

Data menunjukkan bahwa persentase pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) Tanzania mengalami penurunan di tahun 2015-2020 (World Bank, GDP per capita (current US\$) – Tanzania, 2020). GDP Tanzania pada tahun 2020 dihitung sebesar USD \$62,41 miliar yang masih menempatkannya sebagai negara miskin. Pemerintah Tanzania hanya memegang kepemilikan saham sebesar 5-20% dari keseluruhan operasional tambang. Pada akhirnya, sektor pertambangan hanya

berkontribusi sebesar 4% terhadap GDP Tanzania (Kazeem, 2017). Padahal, pemerintahan Magufuli memiliki agenda memperkuat Sosialisme Afrika melalui penguatan industri nasional dan pengetatan kebijakan terhadap lingkungan bisnis perusahaan asing (Harris, 2021).

Berdasar pada anomali-anomali di atas, tulisan ini bertujuan meneliti mengapa Sosialisme Afrika gagal dalam menghindarkan sumber daya alam tambang Tanzania dari posisi tereksplorasi oleh Inggris pada tahun 2015-2020. Hipotesis dari tulisan ini adalah bahwa kegagalan Sosialisme Afrika dalam menghindari Tanzania dari posisi tereksplorasi oleh Inggris merupakan bentuk kegagalan negara dalam dimensi ekonomi dan dimensi politik. Pertama, dalam konteks politik, Sosialisme Afrika hanya berperan sebagai pembentuk kebangsaan tanpa memiliki implikasi lebih lanjut terhadap penguatan institusi dan kebijakan negara. Kedua, dalam konteks ekonomi, kekeliruan pemerintah Magufuli dalam mengimplementasikan konsep ekonomi sosialis mengakibatkan negara rentan terhadap intervensi pihak asing.

Terdapat tiga penelitian sebelumnya terkait alasan kegagalan Sosialisme Afrika Tanzania, yaitu oleh Bjerk, 2010; Lal, 2015; Nursey-Bray, 1980. Ketiganya memiliki kesamaan pendapat bahwa penerapan sosialisme Tanzania bersifat lemah dengan pemerintah yang tidak pernah benar-benar sosialis. Sistem sosialisme yang diterapkan belum mengubah posisi marginal Tanzania sebagai pengekspor SDA mentah ke negara Barat. Tulisan ini kemudian memberi fokus kepada Tanzania dengan pertimbangan bahwa belum ada penelitian yang meneliti fenomena neokolonialisme di kawasan Afrika dari sisi internal negara Afrika. Kebanyakan tulisan melihat fenomena neokolonialisme dan dependensi ekonomi hanya dari struktur internasional yang secara sistematis menempatkan Afrika pada posisi negara periferi dan negara Barat sebagai negara inti. Penelitian terhadap alasan-alasan terjadinya eksploitasi melalui teori kegagalan negara masih kurang diteliti.

Kerangka Pemikiran

Dalam menyusun argumennya, jurnal ini ini mendasarkan pada beberapa tinjauan pustaka yang berfokus pada sosialisme, *resource curse*, dan *teori state-failure*. Sosialisme merupakan sistem yang mengorganisir sektor ekonomi berupa sarana produksi (*means of production*) sebagai kepemilikan publik atau komunal yang

berorientasi terhadap prinsip egaliter (Hoppe, 1990: 2, Newman, 2005: 3, Kornai, 1992: 62). Jika kapitalisme merupakan sistem kontrol produksi oleh pemilik kapital secara privat, sosialisme merupakan sistem kontrol produksi secara setara oleh para masyarakat dan para pekerja (Gilabert & O'Neill, 2019). Keuntungan yang diperoleh dari proses produksi berhak menjadi milik masyarakat dan dapat dialokasikan dalam bentuk konsumsi hingga investasi berdasarkan kesepakatan mutual. Pada aspek pengelolaan sumber daya alam (SDA), sosialisme menyerahkan kepemilikan sumber daya kepada masyarakat dengan diorganisir oleh pemerintah (Stroup, 1980: 268). Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi SDA dengan mengontrol kebijakan serta akses terhadap pemanfaatan sumber daya melalui SOE. Pada aspek investasi asing, sosialisme tidak menyangkal bahwa investasi diperlukan untuk pembangunan. Namun, investasi asing dilaksanakan secara fungsionalis untuk meningkatkan sektor produksi domestik dan pertumbuhan kapital tetap (Kornai, 1992: 171).

Sedangkan teori kutukan sumber daya alam (*resource curse*) adalah kondisi ketika negara yang kaya akan SDA gagal dalam mendapatkan keuntungan penuh dari kekayaannya tersebut dan tidak dapat mensejahterakan kebutuhan publiknya (NRGI, *The Resource Curse: The Political and Economic Challenges of Natural Resource Wealth*, 2015). Perbedaan sikap negara dalam menghadapi *resource curse* dapat dianalisis melalui kebijakan makroekonomi serta peran institusi pemerintah dalam mengelola SDA dan mendistribusikan *social spendings* bagi masyarakat (Hammond, 2011: 371, Horvath & Zeylanov, 2014: 6). Sosialisme terhadap *resource curse* mengambil peran sebagai sistem yang mengembalikan kontrol pemerintah terhadap kekayaan SDAny melalui nasionalisasi produksi. Kesuksesan sosialisme dalam melawan *resource curse* terjadi di Venezuela pada era Hugo Chavez. Chavez melakukan revolusi sosialisme melalui SOE minyak yaitu Petroleos de Venezuela pada lingkup domestik dan internasional dalam melawan imperialisme Amerika Serikat (Hammond, 2011: 366). Keberhasilan tersebut berbeda dengan kondisi Tanzania di era Magufuli yang gagal menerapkan *Sosialisme Afrika* dalam menyelamatkan Tanzania dari *resource curse*. Hal ini menunjukkan bahwa *resource curse* di Tanzania merupakan fenomena khusus yang disebabkan oleh faktor kontingensi dalam mengimplementasikan sosialisme.

Akhirnya, teori ketiga yang digunakan dalam paper ini adalah teori kegagalan negara (*state failure theory*). Rotberg (2003) mengemukakan bahwa negara gagal merupakan negara yang tidak mampu mengakomodasi *political goods* bagi masyarakatnya. *Political goods* merupakan kesanggupan pemerintah dalam menjalankan sistem politiknya agar negara ada dalam kondisi aman, mengeliminasi ancaman domestik, terhindar dari invasi lintas batas, tidak kehilangan teritorialnya, melindungi individu dari ancaman struktur sosial, kejahatan, dan keamanan manusia (*human security*), serta menjamin masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara bebas, terbuka, dan penuh di dalam proses politik negara (Rotberg, 2003: 3). Teori kegagalan negara menjelaskan tingkatan kegagalan negara dengan membedakan antara *strong states* (negara kuat), *weak state* (negara lemah), *failing state* (negara yang sedang gagal), *failed state* (negara yang telah gagal), serta *collapsed state* (negara kolaps).

Pertama, *weak state* atau negara lemah menunjukkan profil yang masih bercampuran, ketika negara mampu memenuhi ekspektasi di beberapa area namun lemah di beberapa hal lainnya (Rotberg, 2003: 4). Negara lemah dapat terjadi karena dua faktor utama: 1) lemah secara inheren atas faktor geografis, fisik, atau ekonomi dan 2) lemah atas tantangan internal dan eksternal tertentu yang sedang dihadapi sehingga mengurangi kemampuan negara untuk menjalankan sistem politiknya. Kedua, *failed state* atau negara yang gagal merupakan negara yang tidak lagi mampu menyelenggarakan fungsi fundamental dari negara-bangsa (Rotberg, 2003: 6). Ketiga, *collapsed state* atau negara kolaps adalah versi ekstrim dan langka dari negara yang gagal (Rotberg, 2003: 9). Negara yang kolaps mengalami kekosongan otoritas pemerintah (*vacuum of authority*) sehingga digantikan oleh *warlord* atau aktor sub-negara yang memiliki kekuatan.

Mayoritas kegagalan negara terjadi atas kesalahan pemimpinnya dan tidak secara insidental (Rotberg, 2003: 25). Dimensi politik dan ekonomi negara lantas menjadi dua faktor utama dalam analisis teori kegagalan negara. Dimensi politik berfokus pada kemampuan institusi negara dalam membawa ide-ide pembangunan negara serta upaya pemerintah dalam melakukan *nation building* sebagai bagian dari proses pembangunan negara (*state building*). Pembangunan bangsa (*nation building*) adalah proses negara dalam membangun budaya serta identitas sebagai bentuk determinasi diri sebagai entitas negara (Linz, 1993: 355). Kemampuan *state building* sebuah negara secara intrinsik

berhubungan dengan dibentuknya *nationhood* (Mulaj, 2019: 231). *Nationhood* merupakan status atau identitas yang mengandung rasa kepemilikan dalam menjadi sebuah negara-bangsa. *Nationhood* digunakan sebagai alat mobilisasi populasi untuk mendukung *state building* atau aksi kontra terhadap identitas pesaing.

Dimensi ekonomi berfokus pada faktor struktural dan faktor kontingen. Faktor struktural adalah karakteristik internal berupa karakteristik ekonomi dan sosiologis yang ada secara mendalam dalam jangka waktu menengah hingga panjang sehingga menghasilkan hambatan terhadap proses *state building*, yaitu kepemilikan SDA serta kapasitas negara (Van de Walle, 2003, dalam Rotberg, 2003: 95, 99). Faktor kontingen adalah aksi jangka pendek dalam bentuk kebijakan politik dan ekonomi yang dihasilkan oleh pemerintah (Van de Walle, 2003, dalam Rotberg, 2003: 104). “Kontingen” merupakan bagian internal negara yaitu *state apparatus* atau aparatur negara (Van de Walle, 2003 dalam Rotberg, 2003: 98). Aparatur negara mempengaruhi alasan-alasan kegagalan *state building* melalui kepentingan, kebijakan, perubahan rezim, serta sistem politik yang dihasilkannya. Kebijakan makroekonomi merupakan faktor kontingen yang menjadi alat analisis utama. Kebijakan makroekonomi yang baik akan mengarahkan SDA pada investasi, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas daya beli negara (Van de Walle, 2003 dalam Rotberg, 2003: 105).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu berbasiskan pada pembuktian serta pengembangan teori melalui fungsi interpretasi data-data kualitatif yang diperoleh (Ezzy, 2002: 3). Sementara, teknik pengumpulan data yang digunakan studi pustaka yang meliputi sumber data primer yang didapat secara langsung dari objek penelitian, dalam hal ini merupakan Tanzania, melalui publikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti undang-undang, publikasi Tanzania, serta pernyataan pemerintah Tanzania; dan data sekunder yang didapat dari penelitian terdahulu, jurnal, buku, serta berita.

Kerangka Konseptual

Sosialisme Afrika

Sosialisme Afrika adalah ideologi pembangunan Tanzania yang memiliki basis utama berupa sistem ekonomi *self-reliance*, sistem politik sosialisme-demokratis, serta hubungan sosial komunal tanpa distingsi kelas-kelas sosial. Sosialisme Afrika menentang kapitalisme yang mengeksploitasi manusia serta memiliki corak berbeda dari sosialisme doktriner dan komunisme karena mengancam kebebasan (Nyerere, 1968: 12 dalam Akyeampong, 2018: 12). Maka, pembangunan negara menurut Sosialisme Afrika bertumpu pada mobilisasi masyarakat secara komunal yang tetap dikontrol oleh pemerintah untuk mendistribusikan kesetaraan. Sosialisme Afrika bertujuan untuk meminimalisir dominasi kekuatan eksternal pada pemanfaatan SDA tambang yang menjadi milik Tanzania secara penuh.

Nationhood

Nationhood merupakan identitas bangsa yang berarti rasa kepemilikan dalam menjadi bagian dari sebuah negara-bangsa. *Nationhood* merupakan komponen *nation building* yang menjadi preseden dari proses *state building*. Identitas bangsa diperlukan sebagai ‘atap’ pelindung dari pembangunan negara (Linz, 1993: 355). Konsep *nationhood* menjadi penting dalam Sosialisme Afrika Tanzania karena sistem sosialisme yang ingin diwujudkan bertumpu pada hubungan komunalisme antara pemerintah dan masyarakat dalam sistem sosialisme-demokratis. *Nationhood* lekat dengan identitas tradisional Tanzania yaitu *Ujamaa* atau *familyhood* yang memandang masyarakat sebagai perpanjangan unit dari keluarga yang menjadi inti pembangunan negara (Mohan, 1966: 231). Pembangunan *nationhood* dalam prinsip sosialisme Tanzania mendukung humanisme, diversitas, agama, dan kebebasan individu (Mohan, 1966: 229).

Sosialisme Afrika Tanzania di Era Presiden John Magufuli (2015-2020) dan Relasinya dengan Perusahaan Tambang Inggris

Sosialisme Afrika Tanzania terbentuk dalam sistem *Ujamaa* yang berarti kekeluargaan (*familyhood*). Sistem sosialisme Tanzania menitikberatkan pada peran bangsa, yaitu masyarakat sebagai perpanjangan dari tiap-tiap unit keluarga (Mohan, 1966: 232). Masyarakat Tanzania diharapkan bergerak menggunakan nilai tradisional, integritas, dan martabat, bukan dengan pergerakan sosialisme yang total dan revolusioner seperti di Uni Soviet. Tanzania memiliki kekayaan tanah dan SDA sebagai modal utama negara

sehingga agenda pembangunan sosialis yang dilakukan berfokus pada kekayaan tanah air (Akyeampong, 2018: 6). *Ujamaa* lantas dijalankan melalui program desa komunal. Sistem sosialisme Tanzania menjadi semakin berbeda dengan mode pembangunan rural daripada industrial untuk menjamin kesejahteraan setiap individu secara lebih dekat dengan pendekatan pada desa (Lal, 2015: 34). Hal ini turut membedakan sosialisme Tanzania dengan negara Sosialisme Afrikalain seperti Ghana yang memanfaatkan dana bantuan dari blok Timur untuk membiayai SOE negara dan Senegal yang meneruskan aset dari koloni Perancis dalam membangun ekonomi. Akan tetapi, interpretasi terhadap penerapan Sosialisme Afrika mengalami pergeseran pada setiap pergantian kepemimpinan di Tanzania sehingga penyimpangan dalam implementasinya dipengaruhi oleh konsepsi tiap-tiap pemimpin.

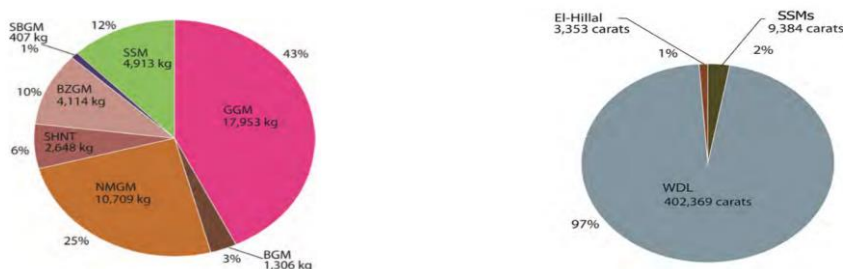
Periode kepemimpinan Magufuli menjadi menarik karena Tanzania dipimpin oleh presiden bergaya pemerintahan otoriter dengan misi "*Tanzanian First*". Magufuli mengimplementasikan prinsip Sosialisme Afrika dengan orientasi ekonomi nasionalis. Ia memperketat kebijakan bisnis pertambangan asing melalui amandemen Mining Act 2010 di tahun 2017 yang mengharuskan pemerintah Tanzania untuk memiliki setidaknya 16% saham di semua proyek pertambangan asing (Harris, 2021). Segala urusan yang berkaitan dengan kesepakatan investasi tambang antara pemerintah dengan pihak swasta dikontrol secara langsung oleh pemerintahan eksekutif. Magufuli meyakini bahwa Tanzania dapat berkembang dengan mereduksi ketergantungan dengan kekuatan ekonomi asing dan memperkuat produksi domestik.

Anomali antara gaya otoriter Magufuli dan penguatan sosialisme dengan kondisi pertambangan Tanzania menjadi nyata ketika kasus-kasus eksploitasi sumber daya tambang oleh perusahaan Inggris justru semakin meningkat pada periode ini (Harris, 2021) menilai bahwa hal ini disebabkan oleh Magufuli yang hanya menggunakan prinsip sosialisme untuk mengamankan dukungan populis dari masyarakat. Magufuli merancang kebijakan-kebijakan ekonominya seakan pemerintahannya melanjutkan legasi dari Nyerere yang merupakan Bapak Bangsa bagi Tanzania. Namun pada praktiknya, perusahaan tambang Inggris masih beroperasi secara eksploitatif di Tanzania. Tidak hanya dieksploitasi dari segi SDA tambangnya, perusahaan tambang Inggris juga mengelabui Tanzania melalui penghindaran pajak (*tax evasion*),

penggunaan kekerasan pada keamanan tambang, hingga penyalahan hak asasi manusia seperti pemerkosaan.

Sementara terkait dengan keberadaan perusahaan tambang Inggris di Tanzania di era John Magufuli, jumlahnya sangat mendominasi. Hal ini semakin terlihat jika dibandingkan dengan eksistensi perusahaan sejenis dari negara lain. Persentasenya pada sektor tambang emas ditunjukkan melalui gambar 2.5.1. Kontributor terbesar adalah Geita Gold Mining (GGM) yang menguasai 43% dari total produksi emas negara (*The United Republic of Tanzania Mining Commission, Annual Report 2018/2019, 2019: 8*). GGM merupakan pertambangan yang dioperasikan oleh AngloGold Ashanti sebuah perusahaan global mandiri yang tidak terasosiasikan dengan negara atau investor dominan tertentu (Ashanti, 2023). Meskipun GGM memiliki persentase besar, perusahaan Inggris tetap memimpin dengan menguasai 44% dari produksi emas negara yang tersebar di beberapa lokasi tambang. Perusahaan Acacia Mining beroperasi di *North Mara Gold Mine* (NMGM) dengan persentase produksi emas sebesar 25%, *Buzwagi Gold Mine* (BZGM) dengan persentase produksi emas sebesar 10%, serta *Bulyanhulu Gold Mine* (BGM) dengan persentase produksi emas sebesar 3% (*The United Republic of Tanzania Mining Commission, Annual Report 2018/2019, 2019: 8*). Selain itu, perusahaan Shanta Gold menguasai 6% dari produksi emas negara dengan operasi tambangnya di *New Luika Gold Mine*. Sedangkan, penambang kecil yang terdiri atas perusahaan dan penambang lokal hanya berkontribusi terhadap 12% produksi emas di Tanzania.

Figur 1 Persentase Kontribusi Produksi Emas dan Berlian di Tanzania pada Tahun 2018-2019



Sumber: The United Republic of Tanzania Mining Commission (2019)

Dominasi perusahaan Inggris pada pertambangan Tanzania semakin terbukti pada sektor tambang berlian yang dapat dilihat melalui figur 1. Kontributor produksi berlian terbesar datang dari *Williamson Diamond Mine* (WDL) dengan menguasai 97% dari

produksi berlian di Tanzania. Pada era pemerintahan Magufuli, perusahaan Inggris yaitu Petra Diamonds menguasai 75% kepemilikan tambang Williamson sementara pemerintah Tanzania hanya menguasai sebesar 25%. Sedangkan, perusahaan tambang Tanzania, yaitu El-Hillal dan penambang kecil lokal hanya berkontribusi masing-masing sebanyak 1% dan 2% terhadap produksi berlian di Tanzania (*The United Republic of Tanzania Mining Commission, Annual Report 2018/2019*, 2019: 8). Ketimpangan dalam persentase produksi berlian ini memperjelas akan terjadinya eksploitasi kepemilikan sumber daya tambang Tanzania, mengingat bahwa tambang Williamson merupakan satu-satunya tambang produsen berlian yang signifikan di Tanzania (Petra Diamonds, 2022).

Merujuk pada data-data di atas, dua perusahaan tambang Inggris yang paling dominan dan eksploitatif adalah Acacia Mining dan Petra Diamonds. Acacia Mining merupakan perusahaan emas yang menguasai tiga tambang emas terbesar, yaitu Bulyanhulu, Buzwagi dan North Mara (Curtis, 2016: 36). Petra Diamonds merupakan perusahaan ekstraksi berlian yang menguasai 75% dari tambang berlian Williamson, sebagai tambang berlian terbesar di Tanzania yang meliputi cadangan berlian sebesar 38 juta karat, disaat pemerintah Tanzania hanya menguasai 25% dari tambang tersebut (Curtis, 2016: 53). Secara Umum, perusahaan Inggris mengeksploitasi pemerintah Tanzania melalui tiga cara, yaitu (1) melalui pengelabuan kewajiban pelaporan ekspor tambang, (2) manipulasi pajak operasional, serta (3) pelanggaran HAM dan nilai-nilai etis dalam lingkungan kerja pertambangan. Acacia Mining dan Petra Diamonds turut melakukan eksploitasi melalui ketiga cara tersebut.

Kegagalan Faktor Politik: Ketidakutuhan Pemahaman dan Implementasi Sosialisme Afrika dalam Melindungi Tanzania dari Fenomena Eksploitasi

Secara umum, terdapat dua faktor politik yang menyebabkan kegagalan *African nationalism* di Tanzania, khususnya jika dikaitkan dengan kekuatan perusahaan tambang Inggris yang dominan mengelola pertambangan di Tanzania. Faktor tersebut meliputi faktor internal dan eksternal.

Pertama, faktor internal yaitu yang mengacu pada ketidakutuhan Sosialisme Afrika dalam aspek politik domestik. Hal ini disebabkan oleh implementasi ideologi yang hanya diprioritaskan sebagai upaya mewujudkan *nation building* dari pada *state*

building. Keseluruhan pembangunan negara membutuhkan keseimbangan antara *nation building* dan *state building*. *Nation building* dan *state building* merupakan dua proses berbeda yang tidak terpisahkan karena setiap negara memerlukan pembangunan *nationhood* berupa identitas dan budaya sebagai ‘payung’ pelindung dari *statehood* (Linz, 1993: 355). Namun, yang terjadi di Tanzania adalah sebaliknya. Pemerintah hanya menginternalisasi Sosialisme Afrika sebagai penguat *nationhood*, tanpa memberikan pengaruh signifikan terhadap reformasi institusi dan kebijakan yang dapat membenahi kontrol pemerintah terhadap sumber daya tambang untuk menyejahterakan perekonomian negara. (Bjerk, 2010: 277) menyatakan bahwa sosialisme Tanzania merupakan kesuksesan politik, bukan kesuksesan kebijakan. Sejak era Nyerere, implementasi sosialisme hanya terbatas pada pendirian politik Tanzania sebagai bangsa yang merdeka, jauh dari konsep sosialisme yang diimpikan untuk menghindari kapitalisme dan mewujudkan ekonomi *self-reliance*.

Tabel 1 Kontribusi Produksi Emas terhadap Pendapatan Tanzania pada 2018/2019

Gold Produced	Unit	Weight	Value (TZS)	Revenue (TZS)	Percentage
Large Scale Miners	Kg	37.136,13	3.444.414.815.215,74	241.109.037.065,10	88%
Small Scale Miners	Kg	4.912,75	468,030,731,422.55	32.762.151.199.58	12%
	Total		3,912,445,546,638.29	273,871,188,264.68	100%

Sumber: The United Republic of Tanzania Mining Commission (2019)

Studi kasus yang membuktikan minimnya ide pembangunan dari implementasi Sosialisme Afrika oleh Magufuli sehingga mengantarkan eksploitasi tambang adalah ketimpangan antara absensi formalisasi *Artisanal and Small-Scale Mining* (ASM) dengan *Large-Scale Mining* (LSM) yang diuntungkan oleh kebijakan tambang Tanzania. ASM merupakan jenis penambang yang melakukan aktivitas pertambangan berskala kecil menggunakan sumber daya dan alat pribadi dan tidak tergabung dalam perusahaan tambang besar (Nalule, 2020: 52). Sedangkan, LSM merupakan penambang berskala besar, terdiri atas perusahaan formal yang melakukan aktivitas pertambangan

berdasarkan standar internasional, termasuk perusahaan Inggris. Merujuk pada tabel 1, produksi emas di Tanzania dikuasai oleh LSM yang memproduksi 88% dibandingkan dengan ASM yang hanya memproduksi 12% emas pada tahun 2018 (*The United Republic of Tanzania Mining Commission, Annual Report 2018/2019*, 2019). Kondisi eksploitasi ini terjadi karena LSM diuntungkan dengan aktivitas tambangnya yang diatur oleh hukum, sedangkan ASM tidak diformalisasikan oleh pemerintahan Magufuli. Padahal, Tanzania sendiri memiliki 1,5 juta ASM dari jumlah total populasi sebanyak 61,7 juta (Nalule, 2020: 52). ASM dikarakteristikan dengan informalitas, bahwa mereka beroperasi dengan status ilegal tanpa diberikan otoritas dan legalitas dari pemerintah. ASM merupakan sektor penting bagi Tanzania karena dapat mempekerjakan masyarakat lokal yang berkontribusi langsung terhadap pendapatan nasional dan pemberantasan kemiskinan (Nalule, 2020: 53). Formalisasi ASM dapat menjadi implementasi unsur kesetaraan dan inklusivitas dari Sosialisme Afrika karena menysar masyarakat menengah ke bawah.

Minimnya formalisasi ASM di Tanzania berpengaruh langsung terhadap kondisi eksploitasi oleh perusahaan tambang Inggris dalam bentuk kekerasan hak asasi manusia. Dengan minimnya fasilitas dan akses ASM terhadap tambang Tanzania maka banyak dari mereka yang menambang secara ilegal di tambang perusahaan Inggris. Hal ini mendorong kecenderungan ASM dalam mengalami kekerasan oleh pihak perusahaan tambang Inggris. Salah satu kasus kekerasan terhadap ASM terjadi di tambang North Mara, yaitu tempat Acacia Mining beroperasi. Pada rentang tahun 2014-2016 terdapat 32 kasus yang berhubungan dengan penambang ilegal. Pada tahun 2016, parlemen Tanzania menerima laporan bahwa terdapat 65 kasus pembunuhan serta 270 individu terluka akibat kekerasan yang dilakukan oleh penjaga tambang Acacia (RAID, 2018). Jika Tanzania ingin mewujudkan sosialisme dengan pemerataan kesempatan produksi dan wujud ekonomi *self-reliance*, maka pemerintah Magufuli seharusnya memperkuat institusi serta payung kebijakan yang dapat memformalisasi status ASM hingga mengakomodasi kerja ASM pada tambang domestik.

Kedua, faktor eksternal yaitu yang menempatkan status Tanzania sebagai negara bekas jajahan Inggris sekaligus anggota *Commonwealth*. Faktor eksternal ini menjadi penyebab gagalnya Sosialisme Afrika karena membentuk sikap ketidakmandirian Tanzania. Kondisi sebagai negara jajahan Inggris memberikan implikasi pada posisi

Tanzania sebagai sumber pemenuhan kebutuhan bahan mentah Inggris. Hal ini dicontohkan melalui kebijakan *High Level Prosperity Partnerships* (HLPP) yang menyepakati bahwa Inggris memberikan investasi dan bantuan pembangunan terhadap eksplorasi tambang Tanzania. Akibatnya, Inggris mengambil peran sebagai sumber *Foreign Direct Investment* (FDI) terbesar kedua di Tanzania, dengan jumlah investasi pada tahun 2020 mencapai £155 juta (Department for International Trade, Trade & Investment Factsheets: Tanzania, 2022). Faktanya, keuntungan yang didapatkan dari FDI tersebut mayoritas mengalir ke Inggris dibandingkan ke Tanzania. Menariknya, posisi Tanzania semakin lemah dengan strategi Inggris yang memperpanjang kuasa neokolonialismenya melalui keberadaan *British islands* (The United Republic of Tanzania Mining Commission, Annual Report 2018/2019, 2019: 3). The United Republic of Tanzania Mining Commission melaporkan bahwa minimnya kontribusi sektor tambang terhadap perekonomian negara disebabkan oleh *tax evasion* atau manipulasi pajak oleh perusahaan-perusahaan asing, diantaranya adalah dari Inggris. Beberapa perusahaan tambang Inggris di Tanzania seperti Shanta Gold dan Wentworth Resources menempatkan kantor pusatnya di Jersey dan Guernsey, dua *British islands* yang memiliki status sebagai *crown dependency* Inggris. Adanya relasi ini memberi jalan bagi perusahaan tambang Inggris untuk mengelabui pajak operasional hingga ekspor di Tanzania dengan memindahkan kekayaannya ke pulau-pulau tersebut yang merupakan negara *tax haven*. Implikasi lain bagi Tanzania sebagai negara jajahan Inggris, adalah keberadaan Inggris sebagai pemimpin *Commonwealth* semakin berpengaruh terhadap proses pembangunan Tanzania di era pascakolonial. Selama tiga puluh tahun, *Commonwealth* memberikan rekomendasi kebijakan sumber daya mineral dan tambang untuk memperkuat sektor ekonomi ekstraktif negara anggotanya (The Commonwealth, 2022). Kondisi tersebut menjadikan sumber tambang Tanzania sebagai penguat sistem kemakmuran *Commonwealth* yang didesain oleh Inggris sebagai pemegang otoritas tertinggi.

Tabel 2 Perbandingan antara Ekspor-Impor Tanzania dan Afrika Selatan dengan Inggris

Countries	Value of Total Export to UK	Value of Total Import from UK	Trade Balance
-----------	-----------------------------	-------------------------------	---------------

Countries	Value of Total Export to UK	Value of Total Import from UK	Trade Balance
Tanzania	£94 million	£139 million	Deficit
South Africa	£4.7 billion	£3.5 billion	Surplus

Sumber: Department of International Trade, Gov UK (2023)

Sebagai konsekuensi dari faktor internal yang didukung oleh faktor eksternal berupa keberadaan *Commonwealth*, Tanzania dan Inggris terikat dalam hubungan yang asimetris. Bantuan pembangunan dan investasi yang diberikan oleh Inggris dan asosiasi *Commonwealth* memang membantu pembangunan Tanzania, tetapi tidak mendorong kemandirian negara untuk membangun faktor produksi dalam mengelola sumber daya tambangnya sendiri. Tanzania terjebak dalam permasalahan internal yang menjadi tantangan investasi asing seperti rendahnya infrastruktur dan teknologi, minimnya pekerja terampil, serta korupsi dalam birokrasi. Tanzania mengalami kerugian besar dari hubungan ekspor-impornya dengan Inggris. Seperti pada tabel 2, total ekspor Tanzania ke Inggris pada tahun 2020 terhitung sebesar £94 juta dan total ekspor Inggris ke Tanzania sebesar £139 juta (Department for International Trade, Trade & Investment Factsheets: Tanzania, 2023). Tanzania mengalami defisit perdagangan sebesar £45 juta yang sangat buruk jika dibandingkan dengan Afrika Selatan. Pada tahun 2020, total ekspor Afrika Selatan ke Inggris sebesar £4,7 miliar dan total ekspor Inggris ke Afrika Selatan sebesar £3,5 miliar (Department for International Trade, Trade & Investment Factsheets: South Africa, 2023). Afrika Selatan mengalami surplus perdagangan sebesar £1,1 miliar.

Intensifikasi Fenomena Resource Curse pada Masa Kepemimpinan Magufuli

Kondisi *resource curse* terintensifikasi pada kepemimpinan Presiden Magufuli. Intensifikasi ini disebabkan oleh pendekatan Magufuli terhadap kontrol sumber daya tambangnya. Magufuli mengklaim kedaulatan penuh terhadap sumber daya tambangnya melalui sistem dominial (Emel et al., 2011, dalam Roder, 2019: 410). Sistem dominial memberikan kontrol terhadap sektor pertambangan secara terpusat pada pemerintah. Pemerintah Magufuli berfokus pada instrumen kebijakan yang dapat meningkatkan

pendapatan negara melalui peningkatan restriksi terhadap perusahaan tambang asing sehingga memprovokasi pemberontakan dari perusahaan-perusahaan Inggris dalam arena politik. Ia menerapkan *economic resource nationalism*, yaitu kebijakan kontrol sumber daya tambang dengan objektif utama untuk meningkatkan pendapatan fiskal (Bremmer & Johnston, 2009 dalam Roder, 2019: 408). Pendekatan-pendekatan di atas dibingkai sebagai implementasi dari prinsip sosialisme, namun justru membawa Tanzania pada periode “mining tsunami” di tahun 2017.

Kebijakan Magufuli terhadap perusahaan Inggris bukan merupakan kebijakan anti-neoliberal, melainkan merupakan bentuk rezim pemerintahan liberal yang ingin memaksimalkan keuntungan ekonomi sehingga jauh dari prinsip Sosialisme Afrika. Poncian (2019: 83) menyatakan bahwa fokus primer dari *economic resource nationalism* merupakan ambisi proyek pembangunan Magufuli yang digunakan untuk mendapatkan dukungan populer serta kekuatan politik atas kebijakan ekonominya yang sosialis. Magufuli mendeklarasikan “economic war” terhadap perusahaan tambang multinasional untuk mendapatkan perhatian masyarakat, namun di satu sisi tetap menunjukkan keterbukaannya terhadap investasi swasta (Poncian, 2019: 83). Maka, pemerintah Magufuli justru menunjukkan karakteristik “kapitalis” dengan mensubordinasi kepentingan masyarakat melalui sistem kontrol sumber daya yang dilaksanakan dengan kepemimpinan populis.

Tanzania masih berada pada posisi sebagai negara miskin yang dinilai melalui tiga indikator. Pertama, melalui indikator kemiskinan yang diukur menggunakan *Gross National Income* (GNI) per kapita. GNI per kapita Tanzania berada di angka USD \$1.050 (World Bank, Atlas method (current US\$), 2023). Sedangkan, minimal GNI per kapita negara untuk keluar dari kategori *least developed countries* adalah USD \$1.230 (OECD, 2020). Kedua, melalui indikator kesejahteraan ekonomi dan sosial individu yang diukur menggunakan HDI. HDI Tanzania berada di angka 0,548 yang masih tergolong jauh dari angka 1 sebagai patokan negara sejahtera (UNDP, 2021). Ketiga, melalui indikator kerentanan negara terhadap ancaman ekonomi, termasuk terhadap stabilitas ekspor, yang diukur menggunakan *Economic Vulnerability Index* (EVI). Tanzania berada pada indeks EVI 34,7 yang masih belum mencapai angka 32 ke bawah sebagai indeks negara berkembang (UN, 2021).

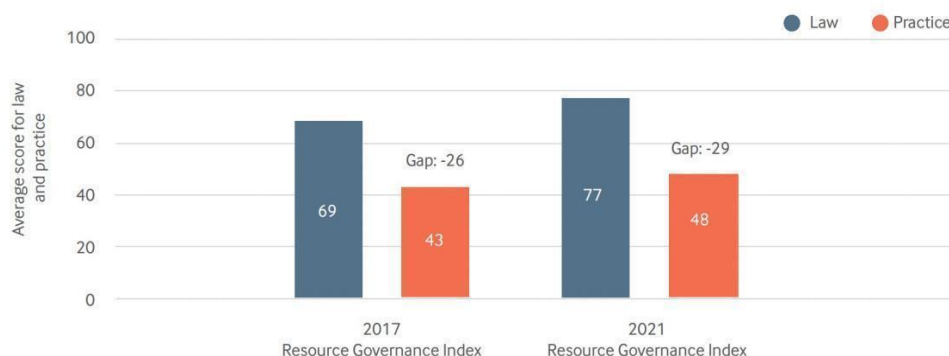
Pengaruh Pemerintahan Magufuli terhadap Kegagalan Implementasi Sosialisme Afrika: Perubahan Kebijakan Pertambangan

Magufuli memiliki ciri kepemimpinan otoriter, represif, serta populis yang menghalangi Sosialisme Afrika dalam menyejahterakan masyarakat Tanzania. Pemerintahan Magufuli memiliki bentuk birokrasi otoritarianisme dengan sistem pemerintahan yang tersentralisasi (Bamwenda, 2018: 124). Sistem ini berdampak terhadap risiko pembatasan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta pluralisme politik yang kemudian didukung oleh dominannya partai politik CCM. Magufuli kemudian membuat kebijakan *Access to Information Act* yang represif. Kebijakan memberikan sanksi penjara terhadap pekerja sipil yang merilis data negara. Hal ini menghasilkan absensi transparansi aktivitas pemerintahan di kalangan masyarakat, khususnya terkait statistik pertumbuhan ekonomi Tanzania (Harris, 2021). Magufuli kemudian mengamankan dukungan dari publik dengan membingkai kebijakan politiknya sebagai penerus Julius Nyerere yang ingin membangkitkan semangat Sosialisme Afrika dengan karakteristik utama pada nasionalisme, *self-reliance*, serta intoleransi terhadap korupsi. Akan tetapi, implementasinya berbanding terbalik dengan pemerintah Magufuli sebagai elit eksekutif yang membatasi keikutsertaan publik dalam politik. Pemerintah Magufuli belum membentuk pemerintahan sosialisme demokratis yang mampu menjadi *middle course* antara kapitalisme dengan komunisme.

Kebijakan yang selama ini mengatur pertambangan Tanzania adalah *the Mining Act 2010*. Pada tahun 2017, Magufuli yang memiliki orientasi untuk menghidupkan prinsip sosialisme melakukan amandemen terhadap UU Pertambangan Tanzania. Beberapa amandemen kebijakan utama yang dilakukan meliputi; 1) kewajiban penyerahan *free carried interest* sebesar 16% oleh setiap perusahaan asing terhadap pemerintah Tanzania, 2) peningkatan pajak royalti dan penetapan penalti pembayaran, serta 3) pemberian kewenangan terhadap pemerintah untuk melakukan renegotiasi kontrak dengan perusahaan tambang asing (*The United Republic of Tanzania, The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act 2017*, 2017). Selain itu, Magufuli turut mendeklarasikan larangan ekspor terhadap konsentrat emas dan perunggu (Mbashiru, 2017 dalam (Roder, 2019: 409). Terlihat bahwa melalui perubahan kebijakan di atas ditujukan untuk mewujudkan “Tanzania First” dengan mengembalikan kontrol

pemerintah Tanzania terhadap sumber daya dengan memperketat operasi perusahaan tambang asing.

Figur 2 Perbedaan Implementasi antara Kebijakan dan Praktik dalam Sektor Pertambangan Tanzania



Sumber: Natural Resource Governance Institute (2021)

Pada praktiknya, amandemen kebijakan yang dilakukan presiden Magufuli belum menunjukkan keberhasilan Sosialisme Afrika untuk memperkuat sektor tambang Tanzania. *Natural Resource Government Institute* (NRGI) melakukan penilaian terhadap praktik kebijakan tambang Tanzania di era Magufuli. NRGI memberikan nilai 58/100 untuk pengelolaan sumber daya tambang Tanzania yang terkategori lemah. Seperti dijelaskan dalam figur 2, NRGI memberikan skor -29 terhadap *implementation gap* atau perbedaan antara kebijakan tambang dengan realisasi yang dilakukan di lapangan (NRGI, 2021 *Resource Government Index: Tanzania*, 2021). Skor ini tergolong dalam pelaksanaan kebijakan negara yang lemah, yaitu ketika kebijakan hukum yang dibuat tidak mencerminkan pelaksanaan yang sejalan. NRGI menilai bahwa implementasi kebijakan tambang Tanzania lemah dalam hal dampak yang diberikan terhadap masyarakat lokal serta perusahaan milik negara (*state-owned enterprise*) (NRGI, 2021 *Resource Government Index: Tanzania*, 2021).

Kegagalan implementasi Sosialisme Afrika dalam kebijakan tambang Tanzania di era Magufuli disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pemerintah Magufuli melakukan praktik politik neo-ekstraktivisme. Neo-ekstraktivisme merupakan bentuk kontrol ekstraksi sumber daya tambang melalui reproduksi mode kapitalis (Roder, 2019: 408). Jauh dari konsep sosialisme yang digaungkan, pemerintah Magufuli mengambil peran sebagai *landlord* dalam sektor tambang. Pemerintah Magufuli mendapatkan akumulasi

kapital dari pengelolaan alur masuknya perusahaan tambang asing mulai dari perizinan, proses ekstraksi, hingga kegiatan ekspor-impor dari perusahaan Inggris. Magufuli menggunakan ‘ekonomi nasionalis’ yang dinarasikan sebagai produk dari prinsip Sosialisme Afrika dalam menjalankan praktik tersebut, yaitu dengan peningkatan restriksi terhadap praktik perusahaan Inggris yang dianggap eksploitatif.

Kedua, pemerintah Magufuli tidak melakukan produksi terhadap sumber daya tambangnya secara mandiri dan efektif yang menjelaskan mengapa Tanzania masih tergolong sebagai negara miskin. Amandemen kebijakan pertambangan tidak menjamin peningkatan kontrol negara terhadap sumber daya tambangnya. Pemerintah Magufuli justru bersikap ambivalen. Magufuli memang meningkatkan restriksi terhadap praktik neoliberal dengan meningkatkan kepemilikan saham pemerintah serta royalti kepemilikan sumber daya tambang, namun ia tidak meningkatkan konsentrasi sumber daya tambang kepada *state-owned enterprises*, penambang lokal, atau terhadap ASM. Padahal, pemerintah Magufuli seharusnya menjadi *custodian* terhadap sumber daya tambangnya sendiri atas nama masyarakatnya yang juga dapat berbentuk penyaluran keuntungan dari sektor tambang terhadap infrastruktur yang dapat membangun negara (Nalule, 2020: 45).

Ketiga, implementasi kebijakan kontrol pertambangan Tanzania tidak diimbangi dengan kekuatan institusi politik. Campbell (2010, dalam Maliganya & Bengesi, 2018) meneliti bahwa di bawah bingkai hukum yang baik, investasi dalam sektor pertambangan sesungguhnya dapat berkontribusi terhadap pemasukan ekonomi yang tinggi. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi di Tanzania. Faktor institusional yang berpengaruh signifikan terhadap ketidakefektifan implementasi Sosialisme Afrika dalam kebijakan tambang adalah adanya korupsi, minimnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta absensi infrastruktur pemerintah yang memadai (Nalule, 2020: 33). Faktor-faktor institusional ini memengaruhi besarnya kerugian pendapatan pajak dari aktivitas perusahaan tambang asing. Korupsi terbukti terjadi dalam jajaran pemerintahan Magufuli. Salah satunya adalah menteri pertambangan, Sospeter Muhongo yang terbukti bekerjasama dengan *Tanzania Mineral Audit Agency* (TMAA) dalam mengelabui pajak laporan ekspor perusahaan tambang (The EastAfrican, 2017). Selain itu, pemerintah Tanzania tidak bersikap terbuka terhadap alur insentif pajak yang didapat dan cenderung menguntungkan investor asing (Maliganya & Bengesi, 2018: 4).

Analisis Faktor Ekonomi: Pengaruh Struktural dan Kontingen dalam Menciptakan Dependensi Ekonomi Tanzania

Selain aspek politik, kegagalan *African nationalism* juga disebabkan karena faktor ekonomi. Keberadaan aspek ekonomi ini disebabkan dua faktor, yaitu faktor struktural dan faktor kontingen. Pertama, faktor struktural melihat pada kapasitas pemerintah dalam menentukan posisi SDA pada proses *state building*, apakah privilese yang dimiliki negara akan mengarah pada kesejahteraan masyarakat atau justru dieksploitasi oleh aktor asing. Adapun kapasitas yang dinilai dalam faktor struktural ini berupa kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan fiskal. Kepemilikan SDA tambang mendorong pemerintah Magufuli untuk merancang peningkatan pendapatan pemerintah melalui kebijakan fiskal, yaitu melalui pemungutan pajak dan royalti terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada sektor tambang Tanzania. Pendapatan fiskal menjadi *easy money* yang menarik investasi asing secara besar-besaran. Jika pemerintah memiliki kapasitas untuk mengelola dengan kebijakan fiskal dengan baik, pendapatan ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi negara dengan digunakan untuk pembangunan negara jangka panjang. Hubungan struktural yang terjadi di Tanzania justru menunjukkan sebaliknya. Pemerintah Magufuli bersifat otoriter dan mendominasi tetapi tidak mengelola sumber daya tambang untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini berujung pada praktik korupsi dan fenomena *resource curse*.

Kesempatan untuk memperoleh pendapatan fiskal dari kekayaan SDA cenderung menyebabkan negara menjadi aktor yang terlibat dalam praktik korupsi dan *rent seeking* (Van de Walle, 2003, dalam Rotberg, 2003: 102). Praktik korupsi dan *rent seeking* terbukti terjadi pada pemerintahan Magufuli. Sospeter Muhongo selaku Menteri Pertambangan dan Justin Ntalikwa selaku Sekretaris Energi dan Mineral terbukti membantu perusahaan tambang asing dalam mengelabui pelaporan ekspor emas. Otoritas Tanzania mendeklarasikan ekspor emas sebanyak 1,1 ton yang seharusnya berjumlah 15,5 ton emas (The EastAfrican, 2017). Pada kasus tersebut, Tanzania diperkirakan kehilangan pendapatan pajak dan royalti sebesar USD\$ 620 juta dari ekspor emas yang tidak dilaporkan (The EastAfrican, 2017). Kasus ini merupakan bentuk terjadinya *resource curse* karena kekayaan SDA yang dimiliki negara tidak didukung oleh kapasitas institusi negara dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal (Van de Walle, 2003 dalam Rotberg, 2003: 102). *Resource curse* terjadi dengan

tingginya angka ekstraksi dan investasi tambang oleh perusahaan Inggris, namun tidak kunjung mengarah pada percepatan pertumbuhan ekonomi Tanzania. Hal ini dikarenakan oleh pemerintah Magufuli hanya menggunakan kekayaan tambang sebagai instrumen masuknya pendapatan dari pihak asing, tanpa memberikan distribusi yang setara terhadap pertumbuhan taraf hidup masyarakatnya.

Faktor struktural menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan struktural dalam *state building* Tanzania, yaitu antara pemerintah Magufuli dengan masyarakat. Ketidakseimbangan ini mempermudah masuknya eksploitasi tambang oleh perusahaan Inggris. Van de Walle (2003, dalam Rotberg, 2003: 102) memandang relasi antara negara yang memiliki kekayaan SDA dengan investor asing sebagai hubungan yang negatif karena negara akan terus mengharapkan bantuan aktor internasional dalam pembangunan negara melalui instrumen investasi. Pemerintah Magufuli memandang kapital dari perusahaan tambang Inggris sebagai insentif dana yang besar untuk membangun infrastruktur publik sehingga mereka melegitimasi praktik ekstraksi tambang oleh perusahaan Inggris. Kondisi ini yang menghambat internalisasi ide-ide pembangunan dari Sosialisme Afrika. Tanzania justru bergantung pada aktor internasional sebagai sumber dana pembangunannya tanpa keinginan untuk meningkatkan pendapatan domestik melalui produksi tambang lokal. Pada akhirnya, masyarakat lokal tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaan sumber daya tambang Tanzania.

Kedua, faktor kontingen yaitu terkait dengan sejauh mana negara pemilik sumber daya melibatkan aktor domestik dalam pengelolaan sumber daya bersama pihak asing. Dalam kasus Tanzania di era Magufuli, ia merupakan aktor dominan yang menentukan pengelolaan kebijakan makroekonomi, dalam hal ini ada terkait dengan pendapatan sumber daya tambang Tanzania. Analisis faktor kontingen adalah mengacu pada kebijakan *local content*, yaitu kebijakan yang mengikutsertakan populasi lokal dalam proses ekstraksi sumber daya tambang oleh perusahaan asing (Magogo, 2022: 26). Pemerintahan Magufuli menuangkan kebijakan *local content* dalam *The Mining (Local Content) Regulations* tahun 2018. Pemerintah Tanzania mendefinisikan *local content* sebagai persentase material, pekerja, barang, dan servis lokal yang diikutsertakan dalam industri pertambangan asing (*The United Republic of Tanzania, The Mining (Local Content) Regulations* 2018 Cap. 212, *The Government Notice*, 2018). Kebijakan *local*

content ditujukan untuk memberikan keuntungan langsung dari sektor tambang bagi masyarakat Tanzania. Keuntungan tersebut dapat berupa pemberian lapangan pekerjaan, transfer pengetahuan, kemampuan, dan teknologi, serta keikutsertaan dalam riset dan pengembangan tambang asing yang dapat mengembangkan kapasitas lokal terhadap industri pertambangan.

Tabel 3 Skor Realisasi Nilai dalam Sektor Tambang Tanzania

Value Realization	2017 RGI Score	2021 RGI Score	Performance Bands
Licensing	50	66	Weak to satisfactory
Taxation	87	85	Good
Local Impact	46	46	Weak
State-owned Enterprises	33	41	Poor

Sumber: Natural Resource Governance Institute (2021)

Presiden Magufuli terbukti kurang dalam menerapkan kebijakan *local content*. Hal ini yang melemahkan kontribusi kekayaan tambang terhadap pembangunan ekonomi negara. Merujuk pada tabel 3, NRGI (2021) memberikan skor 46 untuk pengaruh lokal dari kebijakan tambang Tanzania sehingga tergolong lemah. Keuntungan maksimal yang seharusnya didapatkan oleh negara dari produksi perusahaan tambang Inggris adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, masyarakat Tanzania yang diikutsertakan dalam perusahaan tambang asing berjumlah sangat minim. Hingga pada tahun 2019, masyarakat yang bekerja secara formal pada sektor pertambangan dan penggalian hanya berjumlah 310.000 dari keseluruhan populasi yang berjumlah 59,87 juta (Statista, *Number of people employed in the mining and quarrying industry in Tanzania from 2010 to 2019*, 2022). Kondisi pembangunan negara menjadi semakin buruk karena Magufuli tidak mendistribusikan pendapatan fiskal ini untuk pembangunan masyarakat. Pemerintah Tanzania belum meningkatkan infrastruktur lokal seperti jalan raya, rel kereta, dan transportasi udara (Magogo, 2022:

30). Pemerintah juga tidak meningkatkan kapabilitas internal melalui edukasi, peningkatan teknologi, riset dan pengembangan industri pertambangan lokal (Magogo, 2022: 31). Padahal, kebijakan *local content* seharusnya menjadi implementasi yang mendukung kesetaraan bagi pemerintah dan masyarakat melalui kehadiran perusahaan tambang Inggris di Tanzania.

Minimnya distribusi dana pembangunan oleh pemerintah Magufuli berkaitan dengan bergantungnya pemerintah terhadap dana pembangunan dari Inggris yang diberikan melalui DFID. Pada tahun 2017, DFID memberikan dana bantuan bagi Tanzania sebesar £176 juta, khususnya untuk mendukung pembangunan individu dan ekonomi (Department for International Development, 2017). Sedangkan, pada tahun yang sama anggaran pembangunan Tanzania yang berasal dari pendapatan domestik hanya sebesar TZS 8.969.747 (*The United Republic of Tanzania, Tanzania Draft Budget 2017/2018*, 2017). Dana bantuan DFID jauh melampaui anggaran domestik Tanzania terhadap pembangunan negaranya. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa dana pembangunan dari pihak asing tidak diimbangi dengan pembiayaan pembangunan negara oleh pemasukan domestik (McGillvray & Morrissey, 2000, dalam Moss, Petterson, & Van de Walle, 2005). Dana bantuan asing menjadi pendapatan *non-earned* yang menggantikan pengeluaran domestik dalam membiayai pembangunan dengan kemungkinan besaran dana yang sama dan bahkan lebih besar (Moss, Petterson, & Van de Walle, 2005: 9, 10). Menurut *Department for International Development* (2017):

“In Tanzania, DFID works closely with other UK Government departments to deliver the UK’s objectives. The UK has multiple interests in Tanzania. 70,000 British tourists visit the country each year. 10,000 British nationals and several major UK listed businesses are based here. The UK is the largest source of Foreign Direct Investment in Tanzania. DFID support will help create further opportunities for British business while also creating jobs for young Tanzanians.”

Faktor kontingen menunjukkan adanya dominasi Inggris di atas pemerintah Magufuli yang terjalin dalam implementasi kebijakan pertambangan. Pemerintah Magufuli menunjukkan keberpihakan terhadap Inggris. Inggris mempengaruhi implementasi kebijakan tambang Tanzania pada era Magufuli melalui dua hal. Pertama, melalui besarnya FDI yang disalurkan oleh perusahaan tambang Inggris. *Department for International Development* (2017) menyatakan bahwa Inggris merupakan sumber FDI terbesar bagi Tanzania. Mayoritas FDI di Tanzania ditarik oleh sektor tambang, minyak, dan gas (*Tanzania Invest*, 2021). Kedua, melalui dana bantuan ekonomi yang

disalurkan oleh pemerintah Inggris. DFID menyalurkan bantuan dengan tujuan memperkuat pembangunan ekonomi Tanzania dan lingkungan investasi yang mendukung beroperasinya perusahaan Inggris (*Department for International Development*, 2017). Terlihat bahwa Magufuli menyerahkan kemandirian negara atas produksi tambangnya karena pemerintah bergantung pada besarnya FDI dan bantuan ekonomi yang diberikan oleh Inggris. Hal ini berujung pada parsialitas implementasi Sosialisme Afrika dengan pemerintah yang tidak memihak kepentingan masyarakat Tanzania. Pada akhirnya, perusahaan tambang Inggris menguasai sektor tambang lokal.

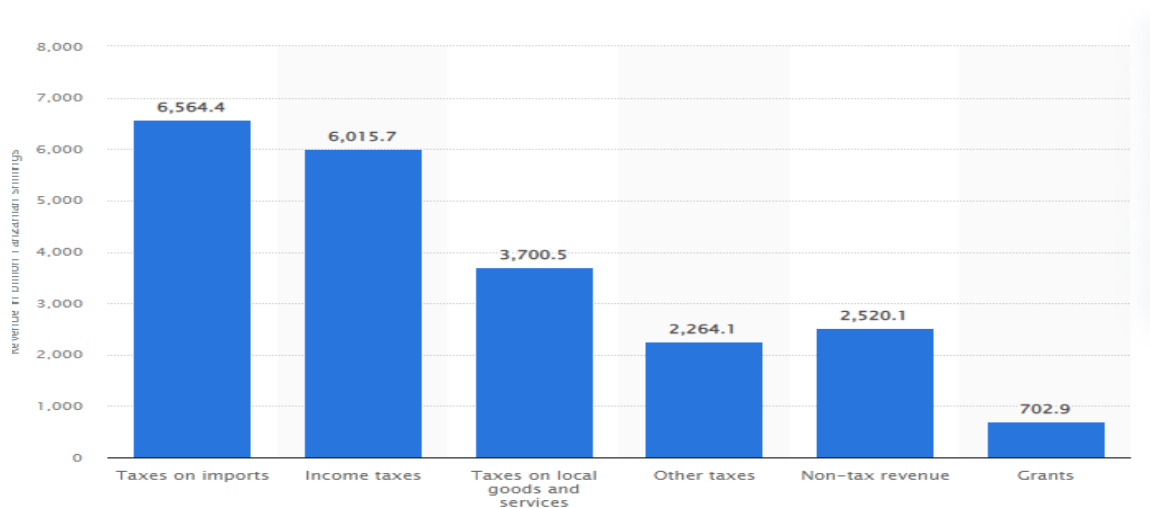
Kebijakan Ekonomi Nasionalis Magufuli: Dependensi Ekonomi Tanzania terhadap Inggris

Kebijakan ekonomi nasionalis pada era Magufuli dilanjutkan dengan agenda “economic war”. Agenda ini diperintahkan oleh Presiden Magufuli sebagai kutukan terhadap investor asing yang dianggap menguras kekayaan tambang dan mineral negara (Jacob & Pedersen, 2018: 4). Magufuli menjalankan gagasan ini melalui penguatan kembali *State Owned Enterprises* (SOE) yang terdiri atas *State Mining Corporation* (STAMICO) dan *National Development Corporation* (NDC). Magufuli juga menjalankan *economic resource nationalism* yang merupakan upaya negara untuk menyeimbangkan aset industri tambang antara kontrol pihak swasta dengan pemerintahan negara (Andreasson, 2015: 7). Meskipun demikian, “nasionalisme” dalam *economic resource nationalism* tidak terwujud. Magufuli hanya menggunakannya sebagai alat untuk mendapatkan pajak dan royalti dari perusahaan asing karena institusi negara tidak siap dalam menjalankan nasionalisasi sektor tambang melalui SOE.

Kebijakan ekonomi yang dibuat untuk kepentingan politik hanya akan menghasilkan kebijakan irasional yang berujung pada melemahnya negara (Van de Walle, 2003, dalam Rotberg, 2003: 101). Implementasi *economic resource nationalism* untuk nasionalisasi kepemilikan sumber daya tambang justru mengarah pada manajemen neopatrimonial. Neo-patrimonial terjadi ketika Magufuli membentuk rezim elitis yang tidak menyeimbangkan keuntungan tambang pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi untuk melegitimasi kekuatan partai CCM dan fokus terhadap pemilihan presidensial kembali. Neo-patrimonialisme semakin didorong oleh

kehadiran *competitive one-party system* pada CCM dengan pemberian kesempatan bagi dua atau lebih kandidat untuk maju pada pemilu. Kandidat *incumbent* menggunakan neo-patrimonialisme untuk mendemonstrasikan kekuatannya (Bratton & Van de Walle, 1994: 463, 473).

Figur 3 Pendapatan Pemerintah Tanzania pada Tahun 2020/2021



Sumber: <https://www.statista.com/statistics/1242876/government-revenue-in-tanzania-by-source/>

Kekayaan sumber daya tambang Tanzania justru mencengkram negara pada dependensi ekonomi terhadap Inggris. Pada tahun 2020, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan Tanzania sebagai satu dari 47 negara yang tergolong pada *least developed countries* (United Nations, 2020). Data ini membuktikan bahwa Sosialisme Afrika belum menarik Tanzania dari posisi negara miskin. Jika Tanzania memang menerapkan prinsip sosialisme yang memfokuskan pemanfaatan sumber daya tambang untuk kesejahteraan ekonomi negara, maka seharusnya pendapatan utama negara tidak bergantung pada FDI dari perusahaan Inggris. Merujuk pada figur 3, (Statista, *Government Revenue in Tanzania as of 2020/2021, by source (in billion Tanzanian shillings)*, 2021) melaporkan bahwa lima pendapatan utama di Tanzania datang dari pajak impor, pajak pendapatan, pajak terhadap barang dan servis lokal, pajak lainnya, serta pendapatan non-pajak. Kelima pendapatan negara tersebut merupakan bentuk pemasukan negara yang didapat dari perusahaan tambang Inggris melalui pembayaran pajak negara, bea cukai, *free carried interest*, serta royalti dalam mengoperasikan tambang di Tanzania. Data ini membuktikan bahwa kebijakan ekonomi nasionalis

Magufuli membuat negara bergantung pada pemasukan yang didapat dari pendapatan fiskal.

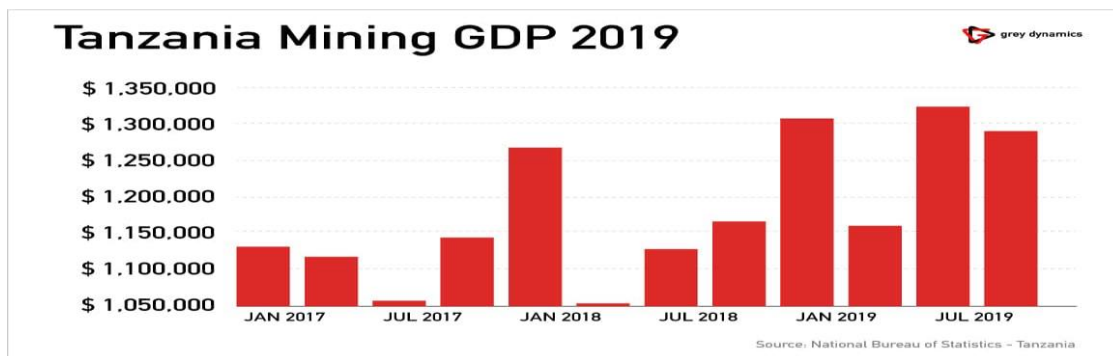
Figur 4 Pendapatan Pemerintah Tanzania pada Sektor Mineral



Sumber: The United Republic of Tanzania Mining Commission (2020)

Pada tahun 2020, sektor tambang berkontribusi sekitar 7% terhadap GDP Tanzania (Statista, *Mining industry in Tanzania - statistics & facts*, 2022). Jumlah tersebut tergolong kecil karena mayoritas produksi tambang Tanzania dikuasai oleh perusahaan tambang Inggris. Dinyatakan pada figur 4, pendapatan sektor tambang Tanzania mengalami peningkatan yang stabil pada periode 2015-2020. Namun, mayoritas persentase kontribusi emas dan berlian datang dari penambang besar yang termasuk perusahaan Inggris. Perusahaan Inggris mampu menguasai pertambangan Tanzania karena mereka memiliki faktor produksi. Sedangkan, pemerintah Magufuli stagnan pada posisi yang terbatas sebagai pengelola kebijakan tambang, tidak meningkat menjadi produsen sumber daya tambangnya sendiri. Minimnya jumlah masyarakat lokal dan ASM yang dipekerjakan secara formal pada pertambangan Inggris berarti bahwa masyarakat memegang aktivitas produksi yang sangat kecil terhadap sumber daya tambangnya sendiri. Kondisi-kondisi di atas tidak sesuai dengan visi Sosialisme Afrika yang menginginkan pembangunan ekonomi bagi Tanzania dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penghindaran neokolonialisme (Mohan, 1966: 230).

Figur 5 GDP Sektor Tambang Tanzania pada Tahun 2017-2019



Sumber: National Bureau of Statistics Tanzania dalam Grey Dynamics (2021)

Ketidakmandirian Tanzania terhadap pengelolaan sumber daya tambangnya mengakibatkan kerentanan negara terhadap intervensi asing berupa eksploitasi oleh Inggris. Melihat pada figur 5, *National Bureau of Statistics Tanzania* dalam (Grey Dynamics, 2021) mengidentifikasi bahwa pada tahun 2018, pendapatan sektor tambang Tanzania mencapai USD \$134,5 juta dengan proyeksi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan tambangnya menuju USD \$205,5 juta pada tahun 2019. Pendapatan negara ini ternyata jauh lebih kecil dari pendapatan produksi Acacia Mining pada tahun 2018 yang mencapai USD \$664 juta (Acacia Mining plc, 2019). Pendapatan Acacia pada produksi emas terhitung tiga kali lipat dari pendapatan Tanzania pada sektor tambang secara keseluruhan.

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa tereksplorasinya sumber daya tambang Tanzania oleh Inggris pada tahun 2015-2020 disebabkan oleh kegagalan implementasi Sosialisme Afrika sebagai ideologi pembangunan negara oleh pemerintah Magufuli. Kegagalan Sosialisme Afrika bukan dikarenakan oleh kesalahan prinsip-prinsip sosialisme Tanzania, melainkan oleh lemahnya implementasi dari pemerintah dan institusi politik Magufuli. Magufuli tidak berhasil menyeimbangkan penerapan Sosialisme Afrika dalam proses *nation building* dan *state building*. Magufuli menggunakan sosialisme sebagai kampanye populisme untuk membentuk *nationhood* berupa hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Sedangkan, ide-ide Sosialisme Afrika yang berorientasi terhadap kemandirian Tanzania, *self-reliance*, asertivitas terhadap neo-kolonialisme, serta kesejahteraan yang setara bagi masyarakat tidak berhasil dicapai. Atas dasar

parsialitas tersebut, prinsip sosialisme memberikan dampak yang minim pada pembangunan politik dan ekonomi Tanzania.

Kegagalan implementasi Sosialisme Afrika dalam menghindarkan Tanzania dari eksploitasi tambang oleh Inggris lantas menempatkan Tanzania dalam posisi *weak state*. Analisis- analisis di atas membuktikan *state-failure theory* dari Rotberg bahwa kategori *weak state* disebabkan oleh tantangan internal dan eksternal yang sedang dihadapi sehingga mengurangi kemampuan negara untuk menjalankan sistem politiknya. Tanzania menjadi lemah dengan adanya kondisi internal berupa parsialitas implementasi Sosialisme Afrika oleh pemerintah Magufuli dalam aspek politik dan ekonomi. Kondisi internal ini semakin dilemahkan oleh kehadiran Inggris sebagai faktor eksternal yang berhasil mendominasi sektor tambang Tanzania melalui kepemilikan faktor produksi oleh perusahaan tambangnya, bantuan dana pembangunan oleh DFID, dan legitimasi posisi politiknya dengan asosiasi *Commonwealth*.

Daftar Pustaka

- Acacia Mining plc. (2019). *Acacia Mining plc ("Acacia") Reports Full Year 2018 Results*. [Online] Available at: <https://dse.co.tz/sites/default/files/ACACIA%20Results%20for%20the%2012%20months%20ended%2031%20December%202018.pdf>. [Accessed 31 Januari 2023].
- Akyeampong, E. (2018). African socialism; or, the search for an indigenous model of economic development?. *Economic History of Developing Regions*.
- Andreasson, S. (2015). Varieties of resource nationalism in sub-Saharan Africa's energy and minerals markets. *The Extractive Industries and Society*.
- Ashanti, A. (2023). *Corporate Profile*. [Online] Available at: <https://www.anglogoldashanti.com/company/corporate-profile/> [Accessed 13 February 2023].
- Bamwenda, E. (2018). The Symptoms of the Shift Towards an Authoritarian State in Tanzania's President John Pombe Magufuli's Rule. *Politeja*, 56 (The Problem of Africa;s Dysfunctional States), pp. 123-150.
- Bjerk, P. K. (2010). Sovereignty and Socialism in Tanzania: The Historiography of an African State. *History in Africa*, Volume 37, pp. 275-319.
- Bratton, M. & Van de Walle, N. (1994). Neopatrimonial Regimes and Political Transitions in Africa. *World Politics*, Volume 46, pp. 453-489.
- Curtis, M. (2016). *The New Colonialism: Britain's Scramble for Africa's Energy and Mineral Resources*. London: War on Warrant.
- Department for International Development (2017). *DFID Tanzania Profile: July 2017*. [Online] Available at: <https://www.gov.uk/government/publications/dfid-tanzania-profile-july-2017> [Accessed 20 Februari 2023].
- Department for International Trade, (2022). *Trade & Investment Factsheets: Tanzania*, s.l.: s.n.

- Department for International Trade. (2023). *Trade & Investment Factsheets: South Africa*, s.l.: s.n.
- Department for International Trade. (2023). *Trade & Investment Factsheets: Tanzania*, s.l.: s.n.
- Ezzy, D. (2002). Theory and Data: A Hermeneutic Approach. In: *Qualitative Analysis: Practice and Innovation*. London & New York: Routledge, pp. 1-31.
- Gilabert, P. & O'Neill, M. (2019). *Socialism*. [Online] Available at: <https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=socialism> [Accessed 3 April 2023].
- Grey Dynamics (2021). *Gold Rush: Benefits of Tanzanian Mining Reforms*. [Online] Available at: <https://greydynamics.com/gold-rush-benefits-of-tanzanian-mining-reforms/> [Accessed 4 Februari 2023].
- Hammond, J. L. (2011). The Resource Curse and Oil Revenues in Angola and Venezuela. *Science and Society*, 75(3), pp. 348-378.
- Harris, M., (2021). *Unfinished Business: Magufuli's Autocratic Rule in Tanzania*”, dalam *Center for Strategic & International Studies*. [Online] Available at: <https://www.csis.org/analysis/unfinished-business-magufulis-autocratic-rule-tanzania> [Accessed 26 September 2022].
- Hoppe, H.-H. (1990). *A Theory of Socialism and Capitalism*. Massachusetts: Kluwer Academic Publisher.
- Horvath, R. & Zeylanov, A. (2014). *The Natural Resource Curse in Post-Soviet Countries: The Role of Institutions and Trade Policies*. s.l., s.n.
- Jacob, T. & Pedersen, R. H. (2018). New resource nationalism? Continuity and change in Tanzania's extractive industries. *The Extractive Industries and Society*.
- Kareparambil, V. (2017). *The Mining Industry in Tanzania: An Overview*. [Online] Available at: <https://www.linkedin.com/pulse/mining-industry-tanzania-overview-varun-kareparambil/> [Accessed 9 Maret 2022].
- Kazeem, Y. (2017). *Tanzania has hit a British mining company with a fine worth two centuries of revenue*. [Online] Available at: <https://qz.com/africa/1038094/tanzania-has-hit-acacia-mining-with-a-190-billion-fine-and-tax-bill/> [Accessed 8 Maret 2022].
- Kornai, J. (1992). Investment and Growth. In: *The Socialist System: The Political Economy of Communism*. Oxford: Oxford University Press.
- Lal, P. (2015). *African Socialism in Postcolonial Tanzania: Between the Village and the World*. New York: Cambridge University Press.
- Linz, J. J. (1993). State building and nation building. *European Review*, 1(4), pp. 355-369.
- Magogo, T. D. B. (2022). Discovering The Question of Benefits in Natural Resources Investment Arrangements: The Case of Mining Sectors of Tanzania. *Commonwealth Law Review Journal*, Volume 8.
- Maliganya, W. & Bengesi, K. M. K. (2018). Policy Enabling Environment of Mining Sector in Tanzania: A Review of Opportunities and Challenges. *Journal of Sustainable Development*, 11(4), pp. 1-12.
- Mohan, J. (1966). Varieties of African Socialism. *The Socialist Register: A Survey of Movements & Ideas*, Volume 3, pp. 221-265.

- Moss, T., Petterson, G. & Van de Walle, N. (2005). *An Aid-Institutions Paradox? A Review Essay on Aid Dependency and State Building in Sub-Saharan Africa*, s.l.: Cornell University.
- Mulaj, K. (2019). On State-Building and Wicked Problems: Stateness, Nationhood and Mimicry. *International Studies*, 56(2-3), pp. 129-146.
- Nalule, V. R. (2020). *Mining and the Law in Africa: Exploring the social and environmental impacts*. London: Palgrave Macmillan.
- Newman, M. (2005). *Socialism: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- NRGI (2015). *The Resource Curse: The Political and Economic Challenges of Natural Resource Wealth*. [Online] [Accessed 10 February 2023].
- NRGI (2021). *2021 Resource Government Index: Tanzania*. [Online] Available at: <https://resourcegovernance.org/analysis-tools/publications/2021-resource-governance-index-tanzania-mining> [Accessed 1 February 2023].
- OECD. (2020). *Annex A. The least developed country category: criteria for inclusion and graduation*. [Online] [Accessed 10 Februari 2023].
- Petra Diamonds. (2022). *Our Mines: Williamson*. [Online] Available at: <https://www.petradiamonds.com/our-operations/our-mines/williamson/> [Accessed 13 Februari 2023].
- Poncian, J. (2019). Galvanising political support through resource nationalism: A case of Tanzania's 2017 extractive sector reforms. *Political Geography*, Volume 69, pp. 77-88.
- RAID. (2018). *Acacia Mining Fails to Address Rights Abuses in Tanzania*. [Online] Available at: <https://www.raid-uk.org/blog/acacia-mining-fails-address-rights-abuses-tanzania> [Accessed 1 Desember 2022].
- Roder, K. (2019). "Bulldozer politics", state-making and (neo-)extractive industries in Tanzania's gold mining sector. *The Extractive Industries and Society*, Volume 6, pp. 407-412.
- Rotberg, R. I. (2003). *When States Fail, Causes and Consequences*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Sipamba, T. M. & Matiko, J. (2021). *The Mining Law Review: Tanzania*. [Online] Available at: <https://thelawreviews.co.uk/title/the-mining-law-review/tanzania-mining-law> [Accessed 9 Maret 2022].
- Statista. (2021). *Government Revenue in Tanzania as of 2020/2021, by source (in billion Tanzanian shillings)*. [Online] [Accessed 26 Januari 2023].
- Statista. (2022). *Mining industry in Tanzania - statistics & facts*. [Online] Available at: <https://www.statista.com/topics/9027/mining-industry-in-tanzania/#topicOverview> [Accessed 1 Februari 2023].
- Statista. (2022). *Number of people employed in the mining and quarrying industry in Tanzania from 2010 to 2019*. [Online] Available at: <https://www.statista.com/statistics/1271691/employment-in-the-mining-industry-in-tanzania/> [Accessed 1 Februari 2023].
- Stroup, R. L. (1980). Controlling Earth's Resources: Markets or Socialism. *Population and Environment*, pp. 265-284.
- TANU. (1967). *The Arusha Declaration and TANU's Policy on Socialism and Self-Reliance*. Dar Es Salaam, The Publicity Section of TANU, pp. 1-29.

- Tanzania Invest. (2021). *FDI*. [Online] Available at: <https://www.tanzaniainvest.com/fdi> [Accessed 23 Februari 2023].
- Tanzania, T. U. R. o. (1992). *Declaration of Multiparty State Act No. 4 of 1992*. s.l.:s.n.
- The Commonwealth. (2022). *Oceans and Natural Resources*. [Online] [Accessed 2022 Oktober 2022].
- The EastAfrican. (2017). *Tanzania President Magufuli asks Mining minister to resign after minerals audit*. [Online] Available at: <https://www.theeastafrican.co.ke/tea/business/tanzania-president-magufuli-asks-mining-minister-to-resign-after-minerals-audit-1366352> [Accessed 5 Januari 2023].
- The United Republic of Tanzania Mining Commission. (2019). *Annual Report 2018/2019*, s.l.: s.n.
- The United Republic of Tanzania Mining Commission. (2020). *Annual Report 2019-2020*, s.l.: s.n.
- The United Republic of Tanzania Mining Commission. (2020). *Revenue and Production Data Trends in Financial Year from 2015-2016 to 2020-2021*, s.l.: s.n.
- The United Republic of Tanzania. (2017). *Tanzania Draft Budget 2017/2018*, s.l.: s.n.
- The United Republic of Tanzania. (2017). *The Written Laws (Miscellaneous Amendments) Act 2017*, s.l.: s.n.
- The United Republic of Tanzania, 2018). *The Mining (Local Content) Regulations 2018 Cap. 212, The Government Notice*, s.l.: s.n.
- UN. (2021). *Least Developed Country Category: United Republic of Tanzania Profile*. [Online] Available at: <https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category-united-republic-of-tanzania.html> [Accessed 10 Februari 2023].
- UNDP. (2021). *Human Development Insights*. [Online] Available at: <https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks> [Accessed 10 Februari 2023].
- United Nations. (2020). *The Least Developed Countries Report 2020. United Nations Conference on Trade and Develo*
- World Bank. (2020). *GDP per capita (current US\$) – Tanzania*. [Online] Available at: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=TZ> [Accessed 7 Maret 2022].
- World Bank. (2023). *Atlas method (current US\$)*. [Online] Available at: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD>. [Accessed 10 Februari 2023].